

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat vital dalam rumah tangga. Menurut Garlans (2014) perencanaan dan pengaturan keuangan rumah tangga merupakan sesuatu yang penting dalam keberhasilan keuangan rumah tangga, sehingga jumlah kekayaan lebih besar dari liabilitasnya. Setiap rumah tangga biasanya memiliki cara tersendiri dalam mengelola keuangan mereka untuk mengoptimalkan pengeluaran untuk mencapai tujuan menurut Pangeran (2012). Pengelolaan keuangan yang efisien tentu akan lebih baik karena semua kebutuhan baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya akan terencana dan pastinya sesuai dengan yang diharapkan.

Ibu rumah tangga merupakan bendahara sekaligus manajer dalam mengelola keuangan rumah tangga. Ibu rumah tangga harus bisa mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. Ibu rumah tangga harus memahami konsep utama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga yaitu biaya (*cost*) dan keuntungan (*benefit*) serta arus kas menurut Andayani (2019). Dalam mengelola keuangan rumah tangga harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Menurut Siregar (2019) ibu rumah tangga yang memiliki kecerdasan dan ketepatan dalam mengelola keuangan keluarga akan mewujudkan keluarga yang sejahtera

Ibu rumah tangga memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat yang

disampaikan oleh Maya Widyana Dewi (2021), peran ibu rumah tangga tidak hanya terbatas pada mengurus kebutuhan rumah tangga dan anggota keluarga, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam mengatur keuangan keluarga. Peran ganda ini sangat memengaruhi kestabilan kondisi finansial rumah tangga. Apabila seorang ibu tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan, maka pengeluaran keluarga berpotensi menjadi tidak terkontrol, yang akhirnya menyebabkan pemborosan. Bahkan ketika penghasilan keluarga tergolong besar, tanpa perencanaan keuangan yang matang dan efisien, kebutuhan hidup tetap bisa tidak terpenuhi secara maksimal. Pengetahuan dan teknologi secara signifikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purnamawati dkk., 2023:67).

Saat ini, kondisi ekonomi semakin menantang, ditandai dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok serta semakin terbatasnya kesempatan kerja. Situasi ini menambah tekanan finansial bagi banyak keluarga, khususnya yang tinggal di pedesaan. Ketimpangan ekonomi yang terjadi pun berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan. Meskipun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional cenderung menurun, kemiskinan di daerah pedesaan tetap berada pada angka yang cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Yacoub (2012), yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah fundamental karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan menjadi isu global yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Situasi ini juga tercermin di Desa Pangkung Paruk, yang terdiri atas tujuh dusun. Berdasarkan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (DTKS), jumlah penduduk

yang tergolong dalam kategori kurang mampu di desa ini menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup signifikan. Adapun rincian data DTKS di masing-masing dusun menggambarkan sebaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Tabel 1.1
DTKS Desa Pangkung Paruk Tahun 2022

No.	Nama Dusun	DTKS	Persentase
1.	Laba Nangga	155	14,12%
2.	Pangkungparuk	177	16,12%
3.	Laba Amertha	206	18,76%
4.	Lebah Mantung	160	14,57%
5.	Yeh Selem	116	10,56%
6.	Kembang Sari	136	12,39%
7.	Laba Sari	148	13,48%
Total		1098	100,00%

Sumber : Pemerintah Desa Pangkung Paruk

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pemerintah Desa Pangkung Paruk, tercatat bahwa pada tahun 2022 sebanyak 1.098 penduduk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah ini tersebar di tujuh dusun, yaitu Dusun Laba Nangga sebanyak 155 jiwa (14,12%), Dusun Pangkung Paruk sebanyak 177 jiwa (16,12%), Dusun Laba Amertha sebanyak 206 jiwa (18,76%), Dusun Lebah Mantung sebanyak 160 jiwa (14,57%), Dusun Yeh Selem sebanyak 116 jiwa (10,56%), Dusun Kembang Sari sebanyak 136 jiwa (12,39%), dan Dusun Laba Sari sebanyak 148 jiwa (13,48%). Jumlah tersebut mencerminkan masih tingginya angka masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan di Desa Pangkung Paruk.

Masyarakat yang terdaftar dalam DTKS menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan penerima berbagai jenis bantuan sosial, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), maupun bantuan beras bagi rumah tangga prasejahtera. Kehadiran bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok.

Secara konseptual, penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pendataan sosial tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari berbagai aspek kondisi kehidupan rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), kemiskinan dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga, seperti kondisi tempat tinggal, akses terhadap fasilitas dasar, kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tingkat pendidikan, serta kondisi pekerjaan rumah tangga. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan masyarakat perlu menggunakan pendekatan multidimensi yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat yang berada pada kelompok miskin dan rentan miskin. Penentuan rumah tangga yang masuk dalam DTKS didasarkan pada berbagai indikator kesejahteraan, seperti kondisi perumahan, kepemilikan aset, sumber mata pencaharian, akses terhadap pendidikan

dan kesehatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi rumah tangga yang benar-benar membutuhkan intervensi kebijakan sosial sehingga program bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Pengelolaan bantuan yang diterima sangat berkaitan erat dengan kemampuan keluarga dalam mengatur keuangan. Dalam hal ini, peran ibu rumah tangga menjadi sangat penting karena mereka berperan langsung dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keluarga. Bantuan sosial yang digunakan secara tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan prioritas, seperti keperluan sekolah anak, konsumsi harian, atau bahkan dialokasikan sebagai modal usaha produktif. Perempuan juga mampu mengelola pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, pola konsumsi, perumahan, dan sosial, yang menunjukkan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga (Indrayani dkk., 2023:157).

Manajemen keuangan yang bijak memastikan bahwa setiap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga dalam merencanakan dan mengatur keuangan, keluarga penerima manfaat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kondisi rentan secara ekonomi dan membangun kemandirian secara perlahan. Kemampuan literasi keuangan sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu memahami dan merespons informasi keuangan dalam pengambilan keputusan penting dalam kehidupan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan (Indrayani dkk., 2024:129).

Fenomena kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Program

PKH deluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007, PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup keluarga yang kurang mampu. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Permensos No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH yang diperbaharui melalui Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial rumah tangga kurang mampu sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) telah diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Di Indonesia, program ini diwujudkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan uang tunai langsung kepada rumah tangga miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Harapannya, bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain meringankan beban ekonomi, PKH juga ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di berbagai daerah. Penyaluran bantuan dilakukan selama satu tahun dengan sistem pencairan sebanyak empat kali, yaitu setiap tiga bulan sekali.

Implementasi program ini juga terlihat di Desa Pangkung Paruk, yang terdiri dari tujuh dusun. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2024, terdapat sebanyak 491 keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH. Dusun Laba Nangga menjadi dusun dengan jumlah penerima terbanyak yaitu 116 orang, diikuti oleh Dusun Pangkung Paruk sebanyak 75 orang, Laba Amertha sebanyak 70 orang, Lebah Mantung 55 orang, Yeh Selem 46 orang, Kembang Sari 63 orang, dan Laba Sari sebanyak 66 orang. Jumlah penerima yang relatif besar ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Pangkung Paruk masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan agar bantuan dari program PKH dapat benar-benar digunakan dengan bijak dan terarah oleh keluarga penerima manfaat, sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara berkelanjutan.

Kesejahteraan merupakan usaha rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan paling dasar seseorang biasanya berupa makanan, pakaian serta tempat tinggal. Menurut (Suharto, 2005) Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaina, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dapat mengindikasikan bahwa kesejahteraan dalam suatu masyarakat sudah terpenuhi sebagian kecil. Menurut (Fadhli & Fahimah, 2021) Kesejahteraan suatu masyarakat atau suatu individu tidak hanya bisa diukur jika hanya menggunakan pendapatan dan juga tingkat pendidikan. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan Lembaga-lembaga sosial yang ditunjukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai setandar hidup dan

kesehata yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat menurut Walker A. Friedlander (1967).

Desa Pangkung Paruk masih menghadapi tantangan ekonomi yang cukup serius, yang terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Pada tahun 2022, sebanyak 1.098 warga desa ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan pada tahun 2024, tercatat 491 kepala keluarga menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun program ini bertujuan untuk mengurangi beban keluarga kurang mampu, angka penerima yang tetap tinggi menunjukkan bahwa taraf kesejahteraan masyarakat belum mengalami perbaikan secara merata. Salah satu aspek yang memengaruhi efektivitas program tersebut adalah cara keluarga penerima, terutama ibu rumah tangga, dalam mengelola dana bantuan yang diberikan.

Dalam praktiknya, ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam mengatur keuangan rumah tangga, termasuk dalam hal pemanfaatan dana bantuan sosial. Ketika pengelolaan keuangan dilakukan tanpa perencanaan yang matang, maka bantuan cenderung habis untuk kebutuhan konsumtif dan tidak memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Keterbatasan dalam merancang pengeluaran secara tepat sering kali menyebabkan bantuan tidak memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Situasi ini tidak hanya mencerminkan persoalan di tingkat keluarga, tetapi juga menjadi gambaran tantangan sosial yang lebih luas. Ketergantungan terhadap

bantuan tanpa disertai dengan kemampuan mengelola keuangan yang baik dapat menghambat tujuan program dalam menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, penguatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan bantuan sosial dalam jangka panjang dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di Desa Pangkung Paruk. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Meskipun pelaksanaan program ini telah berjalan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penerima masih cukup tinggi, yang menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini adalah bagaimana keluarga penerima manfaat, terutama ibu rumah tangga, mengatur dan memanfaatkan bantuan tersebut. Apabila bantuan tidak dikelola secara tepat, maka tujuan utama dari program ini berisiko tidak tercapai, bahkan dapat menghambat perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga.

Melihat permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah kajian lebih lanjut melalui penelitian dengan judul **Pengelolaan Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt**. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana keluarga penerima PKH mengelola dana bantuan yang diterima dan sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya Pemahaman dalam Mengelola Keuangan

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan keterbatasan dalam hal pengetahuan dan kemampuan dalam merencanakan serta mengelola keuangan, sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas kebutuhan rumah tangga.

2. Kecenderungan Ketergantungan terhadap Bantuan

Sebanyak 491 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan pola ketergantungan terhadap dana bantuan Program Keluarga Harapan tanpa disertai inisiatif atau upaya nyata untuk membangun kemandirian ekonomi, sehingga manfaat yang dirasakan cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

3. Kontribusi Bantuan PKH terhadap Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2024, tercatat sebanyak 491 keluarga penerima PKH di Desa Pangkung Paruk. Sebaran terbesar berada di Dusun Laba Nangga dengan 116 penerima, disusul Dusun Pangkung Paruk 75 penerima, Laba Amertha 70 penerima, Lembah Mantug 55 penerima, Yeh Selem 46 penerima, Kembang Sari 63 penerima, dan Laba Sari sebanyak 66 penerima. Merujuk pada data tersebut, jumlah keluarga penerima manfaat bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat mengelola keuangan dengan baik, hal dikarenakan bantuan yang diterima hanya dihabiskan untuk biaya konsumsi rumah tangga dan cenderung bersifat impulsif. Dengan demikian,

pengelolaan keuangan yang tidak sehat pada keluarga penerima manfaat (KPM) berimplikasi terhadap kesejahteraan keluarga, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt sebagai lokasi utama kajian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdomisili di desa tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan untuk mengkaji fenomena pengelolaan keuangan dalam keluarga penerima bantuan PKH, dengan penekanan pada tiga aspek utama. Pertama, menelusuri bagaimana pola pengelolaan keuangan dijalankan oleh penerima manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menganalisis bagaimana bantuan PKH dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti kebutuhan konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, menilai dampak pemberian bantuan PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga dalam konteks penerimaan bantuan sosial bersyarat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pola pengelolaan keuangan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Pangkung Paruk?

2. Sejauh manakah bantuan PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok?
3. Bagaimanakah dampak bantuan PKH terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Desa Pangkung Paruk?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu.

1. Untuk mendeskripsikan pola pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pangkung Paruk.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana bantuan PKH yang dimanfaatkan oleh keluarga penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya.
3. Untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak bantuan PKH terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Desa Pangkung Paruk.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis, untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi keluarga dan sosial, mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga serta pemanfaatan bantuan sosial

bersyarat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

2. Manfaat praktis, sebagai referensi bagi pemerintah, pendamping PKH, maupun masyarakat umum dalam memahami bagaimana pola pengelolaan bantuan PKH dilakukan oleh keluarga penerima manfaat, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

